

ABSTRAK

RIRIS RISNAWATI. 2025. **Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis**. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Universitas Galuh.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang dilakukan dan menemukan suatu masalah yaitu masih kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, seperti BPD kurang berinisiatif dalam membuat rancangan peraturan Desa, BPD kurang memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menjaring aspirasi kepada masyarakat dan, BPD kurang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?”. Teori yang digunakan yaitu menurut Horeopoetri, Arimbi, dan Santosa (2003) terdiri dari 5 dimensi peran yaitu sebagai suatu kebijakan, sebagai strategi, sebagai alat komunikasi, sebagai alat penyelesaian sengketa, dan sebagai terapi. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer yaitu 9 orang yang di wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Teknik analisis/pengolahan data dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) Peran BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Kiarapayung Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan semana mestinya, tetapi masih belum optimal. 2) Hambatan yang dihadapi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa yaitu berupa kurang bekerjasama antara pemerintah Desa dengan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peraturan Desa masih banyak yang belum berpartisipasi, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah Desa sehingga kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai dan 3) Upaya yang dilakukan yaitu menjalin komunikasi yang rutin dengan pemerintah Desa dan masyarakat, mengadakan musyawarah bersama pemerintah Desa dan masyarakat, dan berinisiatif mencari anggaran untuk kepentingan BPD.

Kata Kunci : Peran, Badan Permusyawaratan Desa, Pembentukan Peraturan Desa

ABSTRACT

RIRIS RISNAWATI. 2025. *The Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency*. Government Science Study Program. Faculty of Social and Political Sciences (FISIP). Galuh University.

This research is motivated by the results of observations made and found a problem, namely the less than optimal role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency, such as BPD lacking initiative in drafting Village regulations, BPD lacking in facilitating the Village Government in capturing aspirations to the community and, BPD lacking cooperation with the Village Government and the community. The formulation of the problem in this study is "How is the Role of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency?". The theory used is according to Horeopoetri, Arimbi, and Santosa (2003) consisting of 5 dimensions of role, namely as a policy, as a strategy, as a communication tool, as a dispute resolution tool, and as a therapy. The research design used is descriptive qualitative research method. Primary data sources are 9 people who were interviewed. Data collection techniques in this research are literature studies, field studies (observation, interviews, and documentation). Data analysis/processing techniques in the research are data reduction, data presentation, and data analysis. Based on the research results that 1) The role of BPD in the Formation of Village Regulations in Kiarapayung Village, Rancah District, Ciamis Regency has generally been said to be optimal, but not yet fully. 2) The obstacles faced by BPD in the Formation of Village Regulations are in the form of lack of cooperation between the Village government and the community, lack of public awareness of the importance of Village regulations, and limited budget from the Village government so that the lack of adequate facilities and 3) Efforts made are establishing regular communication with the Village government and the community, holding deliberations with the Village government and the community, and taking the initiative to find a budget for the benefit of BPD.

Keywords: *Role, Village Consultative Body, Formation of Village Regulations*